

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50 - 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI LAMPUNG

SUNARDI¹

sunardifeb@gmail.com

DEWI SARI²

dewisari@gmail.com

LIS DJUNIAR³

Djuniar2018@gmail.com

EMAN SATRIA⁴

Eman_sar21@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palembang, ⁴Kepala Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

Received: 12/01/2021	Revised: 17/02/2021	Accepted: 30/03/2021
----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa LKPD tahun 2015-2017, sehingga 93 observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, usia pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kesejahteraan, belanja modal, dan hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Karakteristik Pemerintah Daerah, Audit BPK dan Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This study aimed at determining the influence of local government characteristics and the results of BPK audit examinations on the performance of local government in the regencies/cities of South Sumatera and Lampung Province. The type of this study was an associative research. The population in this study was 31 regencies/cities in the Provinces of South Sumatera and Lampung. The data used was secondary data in the form of LKPD in 2015-2017, so that 93 observations. The data collection method used in this study was documentation. The data analysis technique used was quantitative and qualitative. Data

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

analysis technique used was multiple linear regression. The results showed that, the age of local government and the level of dependence on the central governments affected the financial performance of local governments, while prosperity, capital expenditure, and the results of BPK audit examinations did not affect the financial performance of local governments.

Keywords: *Characteristics Of Local Government, BPK Audit and Financial Performance.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah harus melaksanakan semaksimal mungkin pelaksanaan dalam pemerintahannya agar dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan terjamin akuntabilitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban APBN yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara atau daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (Kuntadi, 2019). Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Laba bukan merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi unit pemerintah, oleh karena itu diperlukan alat ukur kinerja. (Mardiasmo, 2018). Pemeriksaan atas kinerja keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan pernyataan pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan untuk menilai tingkat efektivitas dari kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan yaitu: > 100% sangat efektif, 100% efektif, 90%-

99% cukup efektif, 75%-89% kurang efektif, dan < 75% tidak efektif. (Mahmudi,2019).

Beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah adalah karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan identitas dan ciri-ciri khusus yang dimiliki setiap daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain.(Ghufron dan Bandi 2015).Karakteristik pemerintah daerah berhubungan dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh setiap pemerintah daerah. Setiap organisasi mempunyai karakteristik yang menjadi ciri khas untuk menguatkan keberadaan organisasi tersebut seperti: umur daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, kemakmuran, dan belanja modal. (Dedi, 2010).

Umur daerah adalah tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan pemerintah daerah tersebut. (Ghufron dan Bandi, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dekeng dan Luki,2019), (Mutiarra, dkk 2017), dan (Galuh ,2019) umur pemerintah yang sudah lama akan mempunyai keahlian dan pengalaman dalam penyajian laporan keuangan, mempunyai pengalaman dalam hal pemeriksaan auditor sehingga dapat mengantisipasi adanya temuan audit dan umur pemerintah yang sudah lama harusnya sadar akan peraturan dan tuntutan masyarakat.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat adalah pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan pada pemerintah pusat salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum merupakan dana yang digunakan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

untuk kegiatan operasional pemerintah berkaitan dengan pendapatan, belanja, aset lancar, dan kewajiban jangka pendek. (Abdul dan Syam, 2012). Menurut penelitian (Rizki,dkk 2019), (Nandhya dan Lulus 2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dapat dilihat dengan DAU dalam total realisasi pendapatan daerah tersebut. Menurut penelitian (Anns,2015) dan (Samul, dkk, 2016) yang berpendapat bahwa tingkat ketergantungan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pelaporan laporan keuangan.

Kemakmuran merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat diukur dari pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, laba dari badan usaha milik negara (BUMN), dan hasil pendapatan daerah lainnya yang sah. (Marja dan Horas, 2017).

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode serta melebihi batasan minimal kapitalis aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. (Marja dan Horas, 2017). Menurut penelitian (Lis dan Ida: 2018) belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Selain karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan juga diperlukan untuk menghindari berbagai macam tindakan

kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Auditor pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Agung M dan Winarningsih S, 2016). Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh audit BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang harus dilaporkan segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menemukan opini yaitu: wajar tanpa pengecualin(WTP), wajar dengan pengecualin (WDP), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan. Selanjutnya temuan audit dapat memoderasi pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan dan temuan audit tidak memoderasi ukuran pemerintah dalam pengungkapan laporan keuangan (Agustingsih SW dkk, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik dan manajemen. Teori ini didasarkan dari teori ekonomi, dari sudut pandang teori agensi *principal* membawahi *agen* untuk melaksanakan kinerja yang efisien dan efektif. (Arfan, 2017).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja bisa berfokus pada *input*. Misalnya uang, staf atau karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja juga bisa berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah *input* menjadi *output* dan kemudian menjadi *outcome*, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan. (Ihyaual, 2012). Dalam menilai

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

kinerja keuangan pemerintah daerah dimulai dari mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan lingkungan, informasi tersebut adalah: populasi, tingkat tenaga kerja, tingkat pendidikan, umur daerah dan lain-lain(Dinapoli TP, 2016)

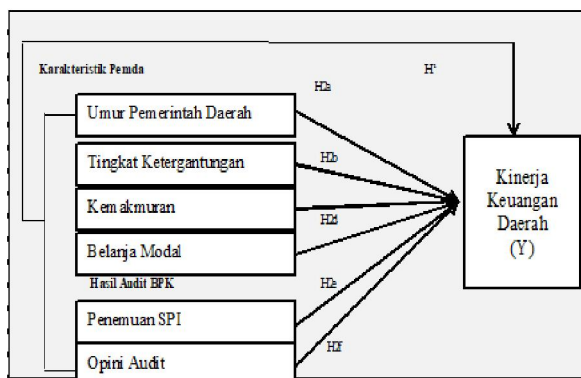
Karakteristik Pemerintah Daerah

adalah ciri-ciri khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. (Aditya,2011). Selanjutnya, setiap organisasi mempunyai karakteristik, yang menjadi ciri khas untuk menguatkan keberadaan organisasi tersebut agar dapat dibedakan dari daerah lainnya. (Dedi Ismatullah, 2010).

Hasil Pemeriksaan Audit

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independensi terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta pencatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. (Kris, 2019).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Umur daerah dapat diartikan sebagai seberapa lama organisasi tersebut berlangsung semenjak tahun pendiriannya. Berdasarkan penelitian Ghufron (2015), Mutiara, dkk (2017) umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian Mutiara, dkk (2017), maka umur daerah dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin lama umur pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut mempunyai struktur organisasi dan penyelenggaraan pemerintah yang semakin matang, dan sadar akan peraturan dan tuntutan masyarakat, sehingga mampu melakukan pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada publik yang semakin besar. Semakin lama umur pemerintah daerah, maka semakin baik kinerjanya (Amyulianty R, dkk, 2016)

H_{2a} : Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat

Pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan pada pemerintah pusat salah satunya berupa dana alokasi umum (DAU). (Restu dan Anni 2016). Lalu hal tersebut di pertegas oleh penelitian (Samuel Christian 2016), yang menyatakan bahwa, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola potensi-potensi yang ada pada daerahnya agar mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan dari penelitian terdahulu tersebut, maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dilihat dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana alokasi umum. tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

memiliki efek negatif pada kinerja pemerintah daerah (Dewata E, et al, 2018). Pemerintah daerah yang wilayahnya sempit (kecil), sulit untuk mengumpulkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran, sehingga memiliki kondisi keuangan yang rendah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi.(Gomesm RC, 2013)

H_{2b} : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Kemakmuran daerah dapat diukur dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan perkapita penduduk suatu daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang terdapat di daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Restu dan Anni (2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Veriza Nanda (2017) menunjukkan bahwa tingka kekayaan daerah atau kemakmuran daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H_{2c} : Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Belanja modal digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode serta melebihi batasan minimal kapitalis aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. (Marja dan Horas, 2017).

Belanja modal, tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah (Dewata E, et al, 2018). Pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal dan kinerja keuangan meningkat.(Kuntari Y, et al. 2019)

H_{2d} : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Penemuan SPI BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pemeriksaan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karna dari hasil pemeriksaan BPK tersebut memberikan pernyataan pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan pemerintah pusat/daerah. (Cris, 2019: 47). Pemerintah daerah yang paling efisiensinya rendah tahap audit, selain itu pejabat yang ingin memperpanjang masa jabatan memiliki kinerja rendah (Chen T.Y, et al. 2012).

Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kinerja keuangan oleh BPK adalah sistem pengendalian internal yang merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh pemimpin disuatu instansi pemerintah ditunjukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, keputusan, dan operasi. opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Kabupaten dan Kota(Dewata E, et al, 2018), Hasil pemeriksaan audit dan temuan audit tidak mempengaruhi kinerja keuangan (Gamayuni RR, 2016)

H_{2e} : Penemuan SPI berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan diseluruh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota Provinsi Lampung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data untuk umur pemerintah daerah kabupaten/kota didapat melalui <http://www.okda.kemandagri.go.id>. Data realisasi anggaran (LRA) untuk mendapatkan data PAD, DAU, dan belanja modal <http://www.djpk.kemenku.go.id>. Diingat untuk hasil temuan audit BPK didapat dari <http://www.bpk.go.id>. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang diambil yaitu laporan keuangan kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dan Lampung melalui website resmi <http://www.djpk.kemenku.go.id>.

Populasi dan sampel, berdasarkan data lengkap laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Lampung yang terdiri dari 32 kabupaten/kota, terdapat 1 (satu) data laporan keuangan kabupaten/kota yang tidak lengkap yaitu kabupaten/kota mesuji. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 31 kabupaten/kota diantaranya 17 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan dan 14 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, dengan tahun observasi 3 tahun, sehingga jumlah 93 observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Statistik Deskriptif

	n	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	92	2,00	58,00	27,7935	21,95327
X2	92	,00	1,82	,4397	,25111
X3	92	,01	,90	,0863	,10671
X4	92	,00	1,10	,2621	,14014
X5	92	2,00	23,00	12,5326	4,81402
X6	92	1,00	4,00	3,7717	,49399
Y	92	26,00	121,00	84,0978	20,16528
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data yang telah dikelola, 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampel sebanyak 92 amatan, nilai tengah variable X1 sebesar 27,7935 dengan standar dwviasi sebesar 21,95327, ini menunjukkan bahwa variable memiliki nilai minimum 2,0 dan nilai maximum 58, begitu juga variable Y memiliki nilai terendah 26,00 dan maximum 121, sehingga memiliki nilai tengah sebesar 84,0978, ini menunjukkan bahwa sebaran data untuk kinerja keuangan pemerintah daerah cukup bervariasi dan terdapat selisih yang besar antara nilai yang terendah dan tertinggi.

Uji Normalitas, berdasarkan gambar grafik normal *P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitaran garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal dan layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas, dilihat dari nilai *tolerance* untuk variabel umur pemerintah daerah, tingkat kete rgantungan, kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF untuk variabel umur pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi persoalan multikoliniertas anatar variabel bebas dalam penelitian ini.

Tabel 2.

Uji Autokorelasi (*Durbin Watson*)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,361 ^a	,130	,080	19,34501	1,388

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X3, X4, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020

Mengacu tabel 3 diketahui nilai DW yaitu 1.388 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson* dimana jumlah sampel N= 31 dan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

jumlah variabel $K = 5$ maka diperoleh $DU = 1.8252$ dan $DL = 1.0904$ maka ditarik kesimpulan $DW > DL$ dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3.
Koefisien Uji Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	38,578	22,292			1,731	,087		
X1	,236	,103	,257		2,305	,024	,805	1,243
X2	18,061	8,342	,225		2,165	,033	,930	1,076
X3	28,184	21,485	,149		1,312	,193	,776	1,289
X4	20,868	15,519	,145		1,345	,182	,862	1,160
X5	-,080	,442	-,019		-,181	,857	,900	1,111
X6	6,281	4,800	,154		1,309	,194	,726	1,378

Hasil uji linier berganda diperoleh persamaan berganda sebagai berikut:
 $Y = 65.212 + 0.270X_1 + 17.648X_2 + 16.513X_3 + 17.333X_4 - 0.214X_5 + e$

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi linier berganda

Uji Regresi Linier Berganda					
ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5456,060	6	909,343	2,450	,031 ^b
Residual	31548,059	85	371,154		
Total	37004,120	91			

^a Dependent Variable: Y

^b Predictors: (Constant), X6, X2, X5, X1, X4, X3

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian hipotesis secara simultan diketahui f_{hitung} untuk variabel independen sebesar 2.450 sedangkan f_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ (5%) serta $df = n - k - 1$, jadi taraf nyata $df = 31 - 5 - 1 = 25$ sehingga f_{tabel} sebesar 2.600. nilai

f_{hitung} sebesar $2.450 < f_{tabel} 2.600$, maka hipotesis H_{01} diterima, dapat disimpulkan bahwa umur pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, kemakmuran, belanja modal, dan penemuan kelemahan SPI berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 5.
Uji Regresi Linier Berganda (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	38,578	22,292			1,731	,087		
X1	,236	,103	,257		2,305	,024	,805	1,243
X2	18,061	8,342	,225		2,165	,033	,930	1,076
X3	28,184	21,485	,149		1,312	,193	,776	1,289
X4	20,868	15,519	,145		1,345	,182	,862	1,160
X5	-,080	,442	-,019		-,181	,857	,900	1,111
X6	6,281	4,800	,154		1,309	,194	,726	1,378

^a Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel umur pemerintah daerah (X_1) sebesar 2.305, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0.05 (5%) serta $df = n - 2 = 29$ adalah sebesar 1.69913 jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai $t_{hitung} (2.305) > t_{tabel} (1.69913)$. t_{hitung} untuk tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat 2.165 dengan signifikansi 0,033, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel tingkat tergantung pada pemerintah pusat (X_2) sebesar 2.165, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0.05 (5%) serta $df = n - 2 = 29$ adalah 1.69913 jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima, karena nilai $t_{hitung} (2.165) > t_{tabel} (1.69913)$. hasil uji hipotesis individual (X_2) menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat signifikansi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). t_{hitung} untuk kemakmuran 1.312 dengan signifikansi

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

0,193, t_{hitung} untuk belanja modal 1.345 dengan signifikansi 0.182, t_{hitung} untuk kelemahan SPI -0.19 dengan signifikansi 0.857, dan t_{hitung} untuk opini audit BPK 1.309 dengan signifikansi 0.726

Umur pemerintahan daerah yang lama, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samuel, dkk (2016), Nih Made Surya dan Eka (2016), Muchamad Gufron (2013), Lestari, dkk (2019), Kowi dan Jatmiko (2017) yang menyimpulkan bahwa jika umur pemerintah daerah sudah lama berdiri, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tinggi, kemakmuran atau tingkat pendapatan PAD tinggi, belanja modal untuk infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik dan hasil pemeriksaan audit BPK yang diproses dengan temuan kelemahan SPI kecil, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan efektif bahkan sangat efektif.

Umur pemerintahan daerah yang sudah lama berdiri, maka kinerja keuangan pemerintah daerahnya akan lebih efektif karena pemerintah yang sudah lama berdiri akan memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP, memiliki kredibilitas, reputasi dan kinerja yang baik serta dapat meminimalisir faktor keterlambatan pelaporan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samuel, dkk (2016), Mutiara, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh dekeng dan luki (2019) dan Galuh (2019) yang menyimpulkan bahwa umur

pemerintah yang sudah lama akan mempunyai keahlian dan pengalaman dalam penyajian laporan keuangan, mempunyai pengalaman dalam hal pemeriksaan auditor sehingga dapat mengantisipasi adanya temuan audit dan umur pemerintah yang sudah lama harusnya sadar akan peraturan dan tuntutan masyarakat.

Semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat akan cenderung membuat pemerintah daerah lebih menaati peraturan yang berlaku, karna dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang semakin besar membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam melaksanakan penatausahaan keuangan. Sehingga LKPD tersaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Annas (2015), Samuel, dkk (2016) yang menyimpulkan tingkat ketergantungan yang tinggi dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan, hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan laporan keuangan yang diamankan oleh pemerintahan pusat. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizki, dkk (2019), Nandhya dan Lulus (2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dapat dilihat dengan DAU dalam total realisasi pendapatan daerah sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif.

Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Eka (2016), Putu dan Adi (2016), Rizki, dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa kemakmuran yang dapat diukur dengan PAD tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan mengingat setiap

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

kabupaten/kota masih menerima dana transfer dari pemerintah pusat salah satunya berupa dana alokasi umum (DAU). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Resti dan Adi (2016), Nadya, dkk (2019), dan Samuel, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Eka (2016), namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samuel, dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja modal secara empiris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini karena anggaran belanja modal direalisasikan untuk penyediaan fasilitas publik dan pembangunan infrastuktur.

Temuan kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan SPI secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan audit BPK memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0.496 dengan nilai signifikansi 0.621, maka semakin banyaknya temuan audit BPK menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan suatu daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu dan Adi (2016), Gusti Made Ary (2018), dan Gamayuni (2016) yang menyimpulkan bahwa temuan

kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit BPK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan audit BPK memiliki koefisien regresi negatif sebesar 1.309 dengan nilai signifikansi 0.194, maka semakin baik opini audit BPK menggambarkan semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu dan Adi (2016), Gusti Made Ary (2018), Ni Made Suryaningsih dan Eka (2016), dan penelitian Gamayuni (2016) yang menyimpulkan bahwa opini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Variabel umur pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Selanjutnya secara parsial variabel umur pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, disisi lain variabel kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, harus dimulai dari pertumbuhan dan pembelajaran di

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

daerah, kemudian proses bisnis intern diperbaiki, sehingga akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan lagi variabel lain, khususnya terkait dengan hasil pemeriksaan audit BPK. Selanjutnya penambahan sampel penelitian dapat dilakukan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih merefleksikan realitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul dan Muhammad Syam.2012.*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Pemerintah Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Agung & Winarningsih, 2016. Effect Of Auditor And Internal Control Competence Apparatus For Local Government Quality Of Financial Reporting, *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research* Vol.4, No.7, pp.113-127,
- Agustiningsih, et al. 2017. Audit Findings, Local Government Characteristics, and Local Government Financial Statement Disclosure, *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 6, Issue 3.pp. 179-187
- Amyulianthy, et al.2016. Characteristics and Political Connection To Local Government Performance, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 8 (2), 2016, pp. 1-14
- Annas L.Mappiasse. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan .*Dosen Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar*2(1)9Oktober, Dari File: Kartu SD/Samsung/Download/721141105 PB Pdf.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Diakses 8 Januari 2020, Dari <https://Lampung.BPJS.go.id/dynamic tabel/2018/04/11/391/jumlah penduduk-menurut-Kabupaten-Kota-di Provinsi-Lampung>.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Diakses 8 Januari 2020, Dari <https://SumateraSelatan.BPJS.go.id/dynamic tabel/2018/04/11/391/jumlah pendudukmenurut-Kabupaten-Kota-di Provinsi-SumateraSelatan>.
- Chen, et al. 2012. Financial performance of Township Governments and its Four Budget Cycles, *African Journal of Business Management* , Vol. 6(2), pp. 530-537,18
- Cris Kuntadi. 2014. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta : Saemba Empat.
- Dedi Ismatullah. 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Bandung: Salemba Empat.
- Dekeng Setyo Budiarto Dan Luki Indarti.2019.Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*Jurnal Akuntansi Bisnis*. 12 (1). Diakses 5 Februari 2020. Dari File:Kartu SD/Samsung/Download/12-6678-7PB.Pdf.
- Dewata, et al. 2018. The Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on the Performance of District and City Governments in Indonesia , *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 5(), 2018, pp 151-162
- Galuh Anggraeny.2019.Pengaruh Jumlah Penduduk,Umur Pemerintah Daerah,Kekayaan Daerah Dan Ketersediaan Prasarana Trasport Terhadap Internet Financial Reporting. *Jurnal Ekonomi* 12 (2).

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Diakses 5 Februari 2020. Dari File: Karu SD/Samsung/Download/11-6563-2.PB.Pdf.
- Gamayuni Rika Rindu.2016. The Effect Of Local Government Characteristics And The Examination Result Of Indonesia Supreme Audit Institution Oneconomic Growth, With Financial Performance As Intervening Variabel In District And City Government Of Lampung Province. *Research Journal Of Financial And Accounting* 7 (18).Diakses 5 Februari 2020. Dari File:Kartu SD/Samsung/Download/12-6678-5PB.Pdf.
- Gomes .R, et al. 2013. Analyzing Local Government Financial Performance: Evidence from Brazilian Municipalities 2005-2008. Disponivel em <http://www.anpad.org.br/rac>, RAC, Rio de Janeiro, pp. 1-16.
- I Gusti Made Ary Anggara Tama. 2018. Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.*Perspektif Akuntansi* 1 (1).Diakses 11 Oktober 2019. Dari File: Karu SD/Samsung/Download/11-6563-2.PB.Pdf.
- Ihyaul Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik*.Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksa.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017.Diakses 14 November 2019. dari <https://Kemendagri.go.id/wp-konten/upload/2019/05/kemendagri-EKPPD-Thdp-LKPD-2017>.
- Kuntari Y, et al. 2019. Capital Expenditure Of Local Governments , Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Issue 1, pp. 1-13
- Lestari Kustari, Rahayu Sri, dan Yudi. 2019. Effect of size of local, Government, Of wealth regional level of reliance capital expenditures and audit findings on BPK.*journal accounting*.1 (2). Diakses 05 Februari 2020. Dari File: Karu SD/Samsung/Download/11-6563-2.PB.Pdf.
- Lis Djuniar dan Ida Zuraidah. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.*Jurnal Akuntansi Dan Bisnis UM Palembang* 3 (2).Diakses 7 Oktober 2019 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 53-57-11-760.PB.Pdf.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*.Edisi Terbaru. Yogyakarta:CV ANDI (Anggota IKAPI).
- Marja Sinurat dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Muchamad Ghufron Taufik. 2015. Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah Karakteristik Inspektorat Pemerintah Daerah Dan Ketepatan Waktu Penyampaian L. *jurnal akuntansi dan bisnis*. diakses 9 Oktober 2019, dari file: Kartu SD/Samsung/Download/11-17-67.PB.pdf.
- Mutiara Madelia, Sri Rahayu, Yudi. pengaruh karakteristik pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif, dan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 50-

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- opini audit BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. *jurnal ilmu akuntansi*. diakses 9 Oktober 2019, dari file: Kartu SD/Samsung/Download/14-17-57.PB.pdf.
- Nandhya Marfiani dan lulus kurniasih. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal akuntansi dan bisnis Universitas Sebelas Maret*. diakses 27 Desember 2019, dari file: Kartu SD/Samsung/Download/11-457.PB.pdf
- Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi* 15 (2). Diakses 9 Oktober 2019, Dari File : Kart SD/Samsung/Download/1133-3876-1- PB.Pdf.
- Noten Ardiyan, Febrianty Ayu, Sarikardawati, dan Ardiani Susi. 2019. Effect of administration on financial performance characteristics of local goverance municipal in south sumatera. *Journal Accounting*. 3 (2). Diakses 5 Februari 2020 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 24-905. PB.Pdf.
- Pratiwi dan Siregar, 2017. The Effect Of Local Government Characteristics And Financial Independence On Economic Growth And Human Development Index In Indonesia, *Jurnal Managemen dan Kewirausahaan*, Vol. 19, No. 2, September 2017, pp. 65–71
- Putu Reisty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergoverental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi* 2016 14 (2). Diakses 9 Oktober 2019 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 542760.PB.Pdf.
- Qowi Rizall dan Jatmiko Tri. 2017. Influence characteristics of local goverance and investigation the performance of government BPK district or city in indonesia fiscal year 2012. *Journal Accounting* 6 (1). Diakses 5 Februari 2020. Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 542760.PB.Pdf.
- Restu Pratiwi dan Y. Anni Aryani. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Kepala Daerah Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi* 20 (2). Diakses 9 Oktober 2019 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 34-905.
- Samuel Cristan Ara. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Pulau Sumba. *Jurnal Akuntansi*. JAFFA 4 (1). Diakses 11 Oktober 2019, Dari File: Kartu SD/Samsung/Download/53234.PB.Pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia. No.9 Tahun 2015. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Utama Rizki Fikri, Evana Einde, Gamayuni Rika Rindu. 2019. The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration. *Research Journal Of Financial And Accounting* 12(2). Diakses 5 februari 2020 Dari File: Kartu SD/Samsung/Download 542760.PB.Pd